



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 120.04/Kep.DPRD-07/2018

TENTANG
REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT
AKHIR MASA JABATAN (LKPJ AMJ) 2013-2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus I telah melakukan pembahasan terhadap Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2017 Dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2013-2018 sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah tanggal 22 Januari 2018
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 02 Mei 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus I Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2017 Dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2013-2018 berupa Rekomendasi yang dituangkan dalam catatan strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Catatan Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berisikan saran, masukan, dan/atau koreksi yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat kedepan.

- KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 02 Mei 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 120.04/Kep.DPRD-07/2018
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN MASA AKHIR JABATAN (LKPJ-AMJ)
2013-2018.
TANGGAL : 02 Mei 2018.

CATATAN STRATEGIS LKPJ T.A. 2017

MERUJUK KEPADA UNDANG - UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PASAL 9 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007, YANG MENGAMANATKAN KEPALA DAERAH UNTUK MENYAMPAIKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, BAIK BERBENTUK LPPD MAUPUN LKPJ - AMJ, SELANJUTNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 25 TAHUN 2013 YANG MERUPAKAN LANDASAN DAN ACUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT SERTA KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI JAWA BARAT DIMANA TOLOK UKUR NYA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN **VISI JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA.**

DI LIHAT DARI GAMBARAN UMUM SITUASI JAWA BARAT DENGAN PENDUDUK MENCAPAI 48,04 JUTA JIWA, YANG MENJADIKAN JAWA BARAT SEBAGAI PENDUDUK TERBESAR DI INDONESIA (18,34%) DENGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK SEBESAR 1,39 %, KONDISI SEBAGAI UPAYA DARI PENGENDALIAN PENDUDUK SEBESAR 0,04% DARI KONDISI TAHUN 2016.

DI TINJAU DARI SUDUT CAPAIAN, MAKA **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA** PADA TAHUN 2017 SEBESAR 70,77 POIN ATAU MENINGKAT 0,27 DARI TAHUN 2016 YAKNI 70,05 POIN, DEMIKIAN HALNYA DENGAN INDEKS PENDIDIKAN TAHUN 2017 SEBESAR 62,19 POIN, INDEKS KESEHATAN ,81,18 POIN DAN INDEKS DAYA BELI 70,22 POIN.

PERSOALAN PEREKONOMIAN SELAMA TAHUN 2017 DISADARI MEMILIKI DINAMIKANYA SENDIRI YANG MEMBERIKAN GRAFIK TERHADAP SITUASI PEREKONOMIAN REGIONAL JABAR, NASIONAL BAHKAN DUNIA. NAMUN DEMIKIAN, DI JAWA BARAT BILA DILIHAT DARI SISI **PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN**. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) MENCAPAI SEBESAR 5,29% ATAU BERADA DI ATAS RATA-RATA NASIONAL SEBESAR 5,07 PERSEN. DEMIKIAN JUGA DENGAN LAJU INFLASI YANG DAPAT TERKENDALI DI KISARAN 3,63 DENGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENCAPAI 27,96 JUTA RUPIAH ATAU MENINGKAT 1,04 JUTA RUPIAH DI BANDING TAHUN 2016 SEBESAR 26,92 JUTA RUPIAH.

TERKAIT PENDAPATAN DAERAH YANG DITARGET RP. 31,37 TRILIUN RUPIAH DPRD MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA SELURUH INSTANSI BIDANG PENDAPATAN DAERAH KARENA TERCAPAINYA PENDAPATAN MELEBIHI TARGET RP. 32,19 **TRILIUN RUPIAH ATAU 102,61 PERSEN DI TAHUN 2017 INI ATAU SENILAI RP. 1,8 TRILIUN RUPIAH, YANG BERASAL DARI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 105,48 PERSEN, RETRIBUSI DAERAH 100,43 PERSEN, PENERIMAAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAPAT DI REALISASIKAN 95,90 PERSEN DAN LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH SEBESAR 113,37 PERSEN.**

PEMERINTAH PUSAT SESUAI UNDANG UNDANG, MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI DAERAH BERUPA DANA PERIMBANGAN RP. 14,11 TILIUN RUPIAH YANG TERDIRI DARI DANA ALOKASI UMUM SEBESAR RP. 3,01 TRILIUN, DANA BAGI HASIL PAJAK /BUKAN PAJAK RP. 1,85 TRILIUN DAN DANA ALOKASI KHUSUS RP. 9,12 TRILIUN .

DIKUTI JUGA DENGAN PEDAPATAN LAIN LAIN YANG SAH SEBESAR RP. 101,38 MILIAR, PENDAPATAN HIBAH RP. 101,06 MILIAR DAN BANTUAN DARI PROVINSI PEMERMERINTAH DAERAH LAIN SEBESAR RP. 70 MILIAR RUPIAH .

BELANJA DAERAH, YANG TERDIRI DARI BELANJA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG PADA TAHUN 2017 INI DAPAT KITA LIHAT JUGA MENGALAMI PENINGKATAN YANG TINGGI, YAKNI BELANJA TIDAK LANGSUNG DIALOKASIKAN SEBESAR RP. 26,76 TRILIUN RUPIAH DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 25,81 TRILIUN RUPIAH ATAU 96,46 PERSEN YANG MELIPUTI BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP. 5,15 TRILIUN RUPIAH, BELANJA SUBSIDI

SEBESAR RP. 14,75 MILIAR, BELANJA HIBAH SEBESAR RP. 9,52 TRILIUN SERTA BELANJA BANTUAN SOSIAL SEBESAR RP. 37,09 MILIAR.

UNTUK **SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA** DIALOKASIKAN BANTUAN KEUANGAN KABUAPTEN/KOTA, DESA SEBESAR RP. 4,17 TRILIUN, BELANJA TIDAK TERDUGA RP. 47,81 JUTA RUPIAH DARI ALOKASI RP. 154,01 MILIAR ATAU HANYA TERPAKAI 0,03 PERSEN SAJA, ADAPAUN **BELANJA LANGSUNG** DI ALOKASIKAN RP. 7,65 TRILIUN RUPIAH DAN HANYA TERSERAP 88,30 PERSEN KARENA DIAKIBATKAN EFFISIENSI PADA BEBERAPA PROGRAM DAN KEGIATAN .

DARI SITUASI DAN LAPORAN GUBERNUR TERKAIT AKHIR TAHUN 2017 INI, MAKA DPRD PADA KESEMPATAN YANG BAIK INGIN MENYAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN STRATEGI DAN DAN REKOMENDASI BAGI PERBAIKAN TAHUN BER JALAN SELANJUTNYA, KHUSUSNYA UNTUK MASUKKAN BAGI GUBERNUR BARU YANG TERPILIH PADA PILKADA BULAN JUNI TAHUN 2018 INI, ADAPUN CATATAN YANG DIMAKSUD ADALAH :

A. BIDANG PEMERINTAHAN.

1. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG DITERIMA OLEH PEMPROV JAWA BARAT DENGAN KWALIFIKASI A HARUS MENDORONG MENINGKATNYA KINERJA DAN PRODUKTIFITAS APARATUR TERUTAMA DALAM HAL PENGELOLAAN PEMRINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK, TERMASUK DI DALAMNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN MASALAH PERIZJNAN YANG PADA SAAT INI SUDAH DI BERLAKUKAN PERIZINAN SATU ATAP.
2. BIDANG INVESTASI DAN PERTAMBANGAN DAERAH PERLU MENJADI PERHATIAN KHUSUS MENGINGAT STRATEGISNYA KEGIATAN DI ATAS BAIK MENYANGKUT TARGET INVESTASI MAUPUN TARGET PEREKONOMIAN LAINNYA DI TENGAH KONDISI MELAMBATNYA PEREKONIMIAN, MASIH LEMAHNYA KOORDINASI ANTAR-INSTANSI SEHINGGA MASIH LAMBATNYA PROSES PERIZINAN YANG MENJADI KELUHAN MASYARAKAT.
3. PROGRAM YANG MENYENTUH DESA-DESA SEPERTI KEGIATAN POSYANDU, RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU), LISTRIK MASUK DESA, PEMBANGUNAN SANITASI DESA, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) PERKOTAAN, PERLU DITINGKATKAN LAGI MENGINGAT BELUM SEMUA LAPISAN MASYARAKAT, BAIK DESA MAUPUN PER-KOTAAN YANG TERSENTUH SECARA MERATA.

4. PENGISIAN JABATAN PEGAWAI KHUSUSNYA ESELON 2 DAN 3 AGAR SEGERA DIISI SESUAI DENGAN SOTK BARU, SESUAI KOMPETENSI DAN MEMAHAMI KULTUR MASYARAKAT JAWA BARAT MESKI MELALUI MEKANISME REKRUITMEN TERBUKA.
5. KEBUTUHAN PEGAWAI PERLU DITATA DAN DISESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN SITUASI BAIK ADANYA PENSIUN, MENINGGAL, ATAUPUN PERPINDAHAN DARI KABUPATEN DAN KOTA SEHINGGA DINAS TEKNIS TERKAIT DAPAT MELAKUKAN SISTEM KEPEGAWAIAN YANG LEBIH TERSTRUKTUR DAN TERBUKA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KEPEGAWAIAN.
6. DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PERLU LEBIH DILENGKAPI DENGAN SISTEM YANG BAGUS, TERTATA DALAM RANGKA Mendukung PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERKAIT SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUTUHAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL MASYARAKAT, SEPerti E - KTP .
7. DALAM MENYUSUN PERATURAN DAERAH ATAU PERATURAN GUBERNUR SEBAIKNYA IKUT DIPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN KABUPATEN/KOTA, TERMASUK UNSUR KEARIFAN LOKAL .
8. PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING PERLU DITINGKATKAN LAGI MENGIKAT SEMAKIN DERASNYA KEDATANGAN TKA TERKAIT DENGAN BANYAKNYA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI PEMBIYAN NEGARA ASING TERSEBUT .
9. PENGELOLAAN ARSIP DAERAH HARUS DIKELOLA DENGAN TENAGA YANG BERKUALITAS, PROFESIONAL, SERTA DIDUKUNG SISTEM TEKNOLOGI YANG BAIK DALAM RANGKA MENGAMANKAN ARSIP DAERAH SECARA LEBIH BAGUS LAGI.
10. TENAGA KERJA LOKAL HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUSNYA DALAM PROSES IZIN INVESTASI AGAR PENYERAPAN TENAGA KERJA DAPAT SEMAKIN MENINGKAT.
11. MEKANISME BANTUAN KEPADA KABUPATEN KOTA SELAIN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH JUGA HARUS MEMPERTIMBANGKAN PROSES ADMINISTRASI YANG LEBIH SEDERHANA SERTA MEMUDAHKAN DALAM PROSES PENCAIRANNYA.
12. PERLU DITINGKATKANNYA APARATUR PEMERINTAH TINGKAT DESA AGAR LEBIH BERDAYAGUNA DALAM MENJALANKAN PROGRAM - PROGRAM DI DESA.

13. PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PERATURAN DAERAH PERLU DIKUATKAN LAGI, KHUSUSNYA TERHADAP PELANGGARAN YANG BERKAITAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN HIJAU, BANDUNG UTARA, BANTARAN SUNGAI, DAERAH MILIK JALAN, YANG MENYEBABKAN BANYAKNYA BANGUNAN LIAR TAK BERIZIN YANG MENGGANGGU DAN DAPAT MENIMBULKAN BENCANA .
14. PENDATAAN DAN PENGELOLAAN ASET HARUS TERUS DITINGKATKAN, DITATA, SERTA DIOPTIMALKAN BAGI KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.
15. KERAWANAN SOSIAL DI JAWA BARAT MASIH MASUK DALAM KATEGORI TINGGI, PERLU DILAKUKAN PENGAWASAN, MONITOR DAN PENEGAKKAN HUKUM SERTA PEMBINAAN TERPADU YANG LEBIH TERKOORDINASI HINGGA TINGKAT APARATUR DI BAWAH.
16. TAYANGAN YANG BERSIFAT KEKERASAN SEPERTI PEMBUNUHAN DAN PORNOGRAFI, PERLU DIBATASI DALAM RANGKA Mendukung ISI BERITA YANG LEBIH BERKUALITAS SEHINGGA PERAN KPID SEBAGAI LEMBAGA YANG BERKOMPETEN PERLU DIDUKUNG DAN DITINGKATKAN.

B. BIDANG PEREKONOMIAN

1. TARGET INDIKATOR EKONOMI MASIH BELUM SEMUANYA TERPENUHI MESKI DEMIKIAN MASIH DI ATAS TARGET NASIONAL.
2. PENCETAKAN 100.000 WIRAUSAHAWAN BARU MASIH BELUM TEREALISASI NYATA DI LAPANGAN DARI SEGI KUALITAS MENINGGAT PROGRAM INI HANYA DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MEMENUHI TARGET KUANTITAS SAJA. KE DEPAN KEGIATAN DAN PROGRAM INI HARUS MAMPU MENINGKATKAN NILAI TAMBAH SEHINGGA MUNCUL WIRAUSAHA MUDA BARU YANG PROSPEKTIF.
3. DESTINASI WISATA JAWA BARAT HARUS BISA MENJADI DESTINASI NASIONAL, TERUTAMA UNTUK KAWASAN BARU STRATEGIS.
4. DATA INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG PEREKONOMIAN SEPERTI PERDAGANGAN, WISATA, INDUSTRI HASIL PERTANIAN, EKSPOR IMPOR HARUS LEBIH VALID LAGI.
5. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG BIDANG PEREKONOMIAN SEPERTI PARIWISATA, AKSES KAWASAN INDUSTRI KECIL, PERLU DITINGKATKAN.

6. PASAR TRADISIONAL HARUS TETAP DIJAGA DISESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN PASAR MODERN SEBAGAIMANA TUNTUTAN MASYARAKAT YANG LEBIH MAJU. SISTEM BANGUNAN, PENATAAN, DAN SISTEM PENJUALAN PERLU DISTANDARISASI DALAM RANGKA MEREKUT PASAR.
7. PERLU DI JAGA PERUBAHAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAN KAWASAN INDUSTRI TIDAK MENGGANGGU LAHAN PERTANIAN SUBUR SEBAGAI AREA PRODUK KETAHANAN PANGAN.
8. PEMBANGUNAN PARIWISATA HARUS MEMILIKI PERENCANAAN TERPADU DAN DI TUNJANG DENGAN KEBUTUHAN PEMBIYAN YANG MEMADAI SERTA DI DUKUNG OLEH PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA SEBAGAI PEMILIK WILAYAH .
9. PROGRAM PERCETAKAN SAWAH BARU SEBANYAK 100. 000 HA BELUM TERERALISASI BAIK.
10. LUAS HUTAN LINDUNG SEBAGAI DAERAH HIJAU PENYANGGA PARU PARU BUMI HARUS MENJADI PRIORITAS UNTUK DI LAKSANAKAN BAGI KEPENTINGAN MASA DEPAN BANGSA SEHINGGA CAPAIAN CAKUPAN WILAYAH HUTAN LINDUNG DI JABAR PERLU DI PENUHI SESUAI TARGET DALAM RPJMD.

C. BIDANGAN KEUANGAN

1. DIVERSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI DALAM PAJAK PAJAK BARU YANG MENJADI KEWENANGAN PROPVINSI PERLU TERUS DI PAYAKAN UNTUK DITINGKATKAN.
2. PERLU DI CARI SUMBER – SUMBER PENDAPATAN BARU YANG BISA MENJADI PENERIMAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI BAGI PEMPROV, TERUTAMA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG SAMPAI SAAT INI MASIH BISA DITINGKATKAN LAGI.
3. CUKAI ROKOK SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PAJAK BAGI HASIL MASIH BISA DI TINGKATKAN LAGI DENGAN MENKOOORDINASIKAN KEMBALI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM HAL DATA DAN KEAKURATAN DATA JUMLAH PENGGUNA ROKOK MAUPUN JUMLAH PENJUALAN DI WILAYAH JAWA BARAT.

4. PERAN BUMD DALAM Mendukung kontribusi terhadap pendapatan daerah masih belum signifikan di bandingkan besaran KUCURAN MODAL KERJA, namun demikian sebagai INSTITUSI PENGHASIL BUMD HARUS DI FASILITASI AGAR LEBIH OPTIMAL.
5. KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SUDAH BAIK, namun demikian dalam mencantumkan target sebaiknya harus cermat sehingga antara perkiraan dan kemampuan pendapatan dapat lebih di tingkatkan lagi.
6. PERLU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERKAIT ASSET DAERAH YANG TELAH DIKERJA SAMAKAN DENGAN PIHAK KE TIGA, termasuk yang proses perjalanannya mengalami kendala sehingga tidak berlanjut termasuk ASSET BUMD sebagai ASSET YANG DIPISAHKAN.
7. SDM BIDANG PENDAPATAN PERLU LEBIH DI TINGKATKAN AGAR MAMPU MEMENUHI TARGET PENDAPATAN DAERAH SESUAI YANG DI RENCANAKAN .
8. BJB SEBAGAI INSTITUSI PERBANKAN HARUS DIAWASI KETAT TERUTAMA TERKAIT ANAK PERUSAHAANNYA BJB SYARIAH, baik DIREKSI, PENGAWAS MAUPUN KINERJA PERUSAHAANNYA AKIBAT KERUGIAN BESAR YANG DIALAMINYA.
9. BJB SEBAGAI ASSET DAERAH PERLU EFFISIEN DENGAN MENGHASILKAN DIVIDEN TINGGI, PENGEMBANGAN KANTOR CABANG DI LUAR PROVINSI AGAR DIBATASI MENIMBULKAN BIAYA OPERASI TINGGI, PROGRAM PEMBANGUNAN DI JABAR YANG MEMBUTUHKAN PEMBIYAAAN HARUS IKUT DAN MASUK SEPANJANG MASIH DALAM KORIDOR KEMAMPUAN USAHA, demikian juga halnya terhadap UKM, MIKRO DAN PENGUSAHA PEMULA AGAR DIBANTU DENGAN MODAL DAN BUNGA YANG MURAH DAN MENARIK.
10. DALAM RANGKA PENGAMANAN CAR MAKA PEMPROV JABAR PERLU MAMBANTU BJB DUKUNGAN MODAL BARU UNTUK PENGEMBANGAN USAHANYA namun demikian hal ini bisa dilakukakan tanpa mengurangi beban APBD TAHUN BERJALAN.

11. PT JASA SARANA HARUS FOKUS DENGAN CORE BISNISNYA AGAR TIDAK TERLAMPAU MELUAS DAN TIDAK EFFISIEN, PERLU ADANYA KONSOLIDASI STRATEGI PERUSAHAAN, SDM, MAUPUN KENDALI TERHADAP ANAK PERUSAHAAN, SEHINGGA TARGET PAD DAPAT TERPENUHI OLEH PERUSAHAAN.
12. PROGRAM WAJIB PAJAK BERIKUT PAJAK PROGRESIF PERLU LEBIH DISOSIALISASIKAN LAGI SEHINGGA MASYARAKAT PAHAM DAN MAU MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA MEMBAYAR PAJAK.
13. PROGRAM KREDIT CINTA RAKYAT PERLU DI PERTAJAM, DIPERLUAS SERTA BEKERJA SAMA DENGAN BERBAGAI ELEMEN PROFESIONAL DAN UKM, DENGAN SUPERVISI PERBANKAN BJB DAN BPR SEHINGGA SELAIN DAPAT LEBIH TERBINA JUGA BISA BERKEMBANG DENGAN BAIK.
14. BUMD YANG BAIK PROSPEKTIF AGAR TETAP DILANJUTKAN, NAMUN UNTUK BUMD YANG BERMASALAH, KURANG BERKEMBANG DAN MENIMBULKAN BEBAN SEBAIKNYA DILIKUIDASI, DI MERGER ATAU DI LEPAS DIKERJA SAMAKAN DENGAN PIHAK SWASTA.
15. PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN BANYAK MELIBATKAN BUMN DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGUSAHA DAERAH BUMD BILA TIDAK DI BATASI , AKIBATNYA KUE PEMBANGUNAN TIDAK TERASA SAMPAI KE DAERAH, BAHKAN PAJAK, DAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA DAERAH MENJADI HILANG.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

1. PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI MASIH BELUM MAKSIMAL MENGIKAT PANJANGNYA JALAN PROVINSI YANG 2.356 KM TINGKAT KEMANTAPAN JALAN SUDAH TINGGI. NAMUN KARENA UMUR RENCANA JALAN YANG SUDAH TUA MASIH BANYAK RUAS YANG PERLU DIPERBAIKI, DIPELIHARA, BAHKAN DI BANGUN KEMBALI.
2. BANYAKNYA JALAN KABUPATEN YANG BERALIH KE PROVINSI MEMERLUKAN ANGGARAN YANG CUKUP BESAR UNTUK PEMELIHARAAN MAUPUN PENINGKATAN.
3. JALAN RAYA CICALENGKA MESKI JALAN NEGARA MASIH SERING BANJIR. SEBAIKNYA PEMPROV MENDESAK DAN BERKOORDINASI UNTUK MELAKUKAN PEMBANGUNAN FLYOVER SEBAGAI ALTERNATIF DARI SOLUSI DARI PERMASALAHAN BANJIR DAN

MACET DI KAWASAN TERSEBUT. MINIMAL ADA PENATAAN SERIUS DI KAWASAN ITU.

4. KOORDINASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTARA KABUPATEN DAN PROPINSI PERLU LEBIH DITINGKATKAN, TERUTAMA DALAM HAL PEMBEBASAN LAHAN. MISALNYA, UNTUK PEMBANGUNAN IRIGASI SEPERTI DI SUKABUMI, WADUK DI CIAMIS DAN KUNINGAN.
5. REALISASI PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN TPPAS REGIONAL, BAIK DI NAMBO MAUPUN LEGOK NANGKA HARUS DIPERCEPAT.
6. PROGRAM RUTILAHU AGAR LEBIH DITINGKATKAN DI INFORMASIKAN SECARA TRANSPARAN AGAR MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN DAPAT MENGETAHUINYA SERTA BISA MENGAJUKAN KE INSTANSI TERKAIT.
7. PROGRAM LISTRIK MASUK DESA MASIH DI BUTUHKAN MESKI RASIO ELEKTROFIKASI SUDAH DI ANGKA 99.8 %. HAL INI TERBUKTI DENGAN MASIH ADANYA PENGAJUAN PENYAMBUNGAN LISTRIK DARI MASYARAKAT.
8. GAGAL LELANG PERLU DICERMATI PENYEBABNYA, PILIH PELAKSANA LELANG YANG KREDIBEL, MEMILIKI KUALIFIKASI-KOMPETENSI YANG TINGGI SEHINGGA UMUR HASIL PEMBANGUNAN LEBIH LAMA DAN BAIK.
9. KOORDINASI TERKAIT PERIZINAN ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA PERLU DITINGKATKAN LAGI TERLEBIH DI KAWASAN METRO BANDUNG, BODEBEK AGAR TIDAK TUMPANG TINDIH, BAHKAN TERKESAN LEPAS TANGAN BILA TIMBUL PERMASALAHAN.
10. PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM IMPLEMENTASINYA HARUS KONSISTEN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 DAN ATURAN PELAKSANAANNYA, SELANJUTNYA DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEGERA MENERBITKAN PERATURAN GUBERNURNYA.
11. PROGRAM CITARUM HARUM AGAR DIDUKUNG PENUH DARI BERBAGAI ASPEK, MENGINGAT SAAT INI PEMRINTAH PUSAT TELAH TURUN MEMBANTU PENYELESAIAN DAMPAK LIMBAH DI SUNGAI CITARUM.

12. PROGRAM MASYARAKAT TERKAIT ECO VILLAGE DI SEKITAR PINGGIR KAWASAN SUNGAI CITARUM AGAR DITINGKATKAN UNTUK MEMBERIKAN EDUKASI TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DI WILAYAH TERSEBUT.
13. REBOISASI DI HULU SUNGAI SERTA PERUBAHAN FUNGSI LAHAN AGAR DIKENDALIKAN TERUTAMA YANG MERUBAH FUNGSI HUTAN RAKYAT KARENA DAPAT MENYEBABKAN TIDAK TERTAHANNYA LIMPAHAN AIR SUNGAI SAAT SUNGAI MELUAP.
14. POTENSI ENERGI PANAS BUMI YANG BESAR AGAR DIOPTIMALKAN, DIBANGUN DENGAN MELIBATKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA SERTA BUMN YANG BERPENGALAMAN
15. KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN SEGERA DIAJUKAN KE PENGADILAN.
16. HASIL PENELITIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT SEPERTI PENGEMBANGAN SAPI, AYAM, MAUPUN TEKNOLOGI TEPAT GUNA AGAR DIKERJASAMAKAN DENGAN PERGURUAN TINGGI, SERTA HASILNYA DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT.
17. PROGRAM SANITASI AGAR TEPAT SASARAN.
18. SISTEM PEMBANGUNAN AIR MINUM (SPAM) HARUS DIDEKATKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, KHUSUSNYA DI PERKOTAAN, KERJA SAMA DENGAN WARGA DALAM PENGELOLAAN SEHINGGA DAPAT DILAKUKAN SECARA MANDIRI KE DEPANNYA.
19. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN STAKE HOLDER AGAR LEBIH DITINGKATKAN, BAIK TENTANG INFORMASI PEMBANGUNAN, KERJA SAMA, MAUPUN KETERLIBATANNYA, TERUTAMA DUNIA USAHA SWASTA DAERAH SEPERTI HIPMI, KADIN, ATAU ASOSIASI HIMPUNAN.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. PELAYANAN KESEHATAN HARUS LEBIH DITINGKATKAN LAGI TERUTAMA DI PUSKESMAS, RSUD MAUPUN RUMAH SAKIT RUJUKAN, DENGAN LEBIH MENINGKATKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENAMBAH FASILITAS, ALAT KESEHATAN, RUANG PERAWATAN, SEHINGGA MASYARAKAT DAPAT LEBIH TERLAYANI.

2. DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN PERAWAT PERLU DITAMBAH KHUSUSNYA DI DAERAH TERPENCIL DAN KABUPATEN YANG SANGAT MEMBUTUHKAN DAN DIBERIKAN INSENTIF SECARA KHUSUS.
3. PROGRAM BEA SISWA PERLU DITINGKATKAN LAGI BAIK JUMLAH MAUPUN ALOKASI ANGGARANNYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN SDM BAIK DARI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU.
4. PENANGANAN PMKS (PROSTITUSI, TRAFICKING, PENGEMIS PENGAMEN, ANAK JALANAN DAN KORBAN NARKOBA) LEBIH DITINGKATKAN, TERUTAMA FASILITAS TEMPAT REHABILITASI, PENGOBATANNYA.
5. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, KHUSUSNYA SMA, AGAR DILAKUKAN PERBAIKAN DALAM PROSEDUR DAN PELAKSANAANNYA, KHUSUSNYA TERKAIT INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI.
6. SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT MILIK PROVINSI PERLU LEBIH DILENGKAPI MENGGINGAT SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN MEMBUTUHKAN FASILITAS YANG LEBIH MAKSIMAL.
7. PERLU ADANYA TINDAKAN YANG LEBIH INTENSIF DALAM BIDANG KEOLAHRAGAAN BAIK MENYANGKUT SARANA DAN PRASARANA MAUPUN PEMBINAAN ATLET DAN TERSELENGGARANYA KEGIATAN OLAH RAGA.
8. PEMBAGUNGAN JALAN TOL CIGATAS, SUKABUMI BANDUNG DAN PROYEK STRATEGIS AGAR DIPRIORITASKAN DALAM KEPEMIMPINAN GUBERNUR KE DEPAN.
9. RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT PROYEK NASIONAL SEPERTI KERETA API CEPAT, PELABUHAN PATIMBAN, AGAR DILAKUKAN REVISI RTRW-NYA.

KESIMPULAN

KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH SELAMA TAHUN 2017 SESUAI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN RPJMD 2013-2018 SECARA SUNGGUH – SUNGGUH BERUPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN YANG SUDAH DI TETAPKAN BERSAMA DPRD, HAL INI PATUT KITA SAMA – SAMA APRESIASI. HAL INI TERLIHAT DARI LANCARNYA BERBAGAI MACAM PERSOALAN YANG MUNCUL TERKAIT TUGAS DAN KEWENANGAN PEMPROV AKIBAT PERUBAHAN PERATURAN SEPERTI

PENANGANAN DAN PENGELOLAAN SMA/SMK YANG MENYERAP ANGGARAN YANG BESAR DI TAHUN 2017 INI.

PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH PUSAT MENUNJUKKAN BAHWA ARAH PEMBANGUNAN SUDAH BENAR DAN SESUAI SELARAS DENGAN PERATURAN YANG ADA. NAMUN DEMIKIAN, SETELAH MENKAKAJI DAN MELIHAT DALAM TATARAN IMPLEMENTASI DI LAPANGAN MASIH MENEMUKAN PERMASALAHAN DI LAPANGAN YANG MEMBUTUHKAN PERBAIKAN DI MASA MENDATANG.

LKPJ GUBERNUR TAHUN 2017 MENCATAT ADANYA PENINGKATAN BERBAGAI INDIKATOR KE ARAH POSITIF. HAL INI TERLIHAT DARI ASPEK DAYA SAING PROVINSI, PELAYANAN PUBLIK, DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

DEMIKIAN PULA DENGAN ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERJADI PENINGKATAN YANG SIGNIFIKAN. MESKI DEMIKIAN, PERAN PENDAPATAN DAERAH DARI KONTRIBUSI BUMD DAN PENDAPATAN LAIN LAIN MASIH BELUM MENUNJUKKAN KENAIKAN YANG BERARTI. BAHKAN, ADA YANG TIDAK MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUSI. HAL INI PERLU MENJADI PERHATIAN DAN LANGKAH PERBAIKKAN DI MASA YANG AKAN DATANG.

REKOMENDASI

DALAM RANGKA LKPJ TAHUN 2017 INI TELAH MENDAPAT MASUKKAN DARI KOMISI-KOMISI TERKAIT KINERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DITAMBAH PENINJAUAN LAPANGAN. BERDASARKAN PEMBAHASAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN HAL – HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. REKOMENDASI TAHUN 2016 YANG MASIH BELUM DAPAT DI LAKSANAKAN SESUAI REKOMEDASI DPRD AGAR TETAP DILAKSANAKAN, DEMIKIAN HALNYA DENGAN PROGRAM KEGIATAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG MASIH BELUM OPTIMAL DI TAHUN 2017 AGAR TETAP DILANJUTKAN DI TAHUN 2018 INI, MESKI ADANYA KEPEMIMPINAN GUBERNUR BARU.
2. STANDARISASI SISTEM PELAPORAN DIBUAT LEBIH SEDERHANA, MENYELURUH, DAN MAMPU MEMBERIKAN PELAPORAN TERKAIT CAPAIAN, INDIKATOR, MAUPUN EVALUASI YANG LEBIH TERUKUR BERDASARKAN RPJMD, SERTA MEMBERIKAN GAMBARAN RINGKAS DAN DETAIL TERKAIT POSISI JABAR DI TINGKAT NASIONAL, DAYA SAING ANTAR PROVINSI, MAUPUN HUBUNGAN DENGAN KABUPATEN KOTA.

3. DENGAN DIDAPATNYA PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR YAKNI A/UTAMA MAKA HAL INI HARUS MENJADI PEMICU MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM KEPADA MASYARAKAT. NAMUN DEMIKIAN, MELIHAT KONDISI KABUPATEN DAN KOTA YANG MASIH MENDAPAT NILAI B DAN C, SEBAIKNYA PEMPROV JABAR MEMBERI ASISTENSI DAN TRANSFER KNOWLEDGE DALAM RANGKA MEMBERIKAN STANDARISASI PELAYANAN DI JABAR YANG LEBIH OPTIMAL.
4. PENGLOLAAN ASSET YANG SUDAH BAIK PERLU TERUS DITINGKATKAN DENGAN SISTEM PENDATAAN MODERN YANG LEBIH TERTATA LAGI. DEMIKIAN HALNYA DENGAN ADANYA BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PENAMBAHAN MAUPUN PENGURANGAN ASSET AGAR DICERMATI SUPAYA DATA YANG DI MILIKI LEBIH RILL DAN SESUAI DENGAN AZAS KEPEMILIKAN YANG DIATUR UNDANG –UNDANG.
5. WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) YANG DISAMPAIKAN BPK PERLU DIAPRESIASI SELAIN KEMAMPUAN DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET YANG TELAH TEPAT. HAL INI JUGA MENUNJUKKAN KETAATAN PEMERINTAH TERHADAP ATURAN. KE DEPAN IMPLEMENTASI TEKNIS DI TINGKAT PERANGKAT DAERAH PERLU LEBIH SELARAS DAN LEBIH BAIK LAGI.
6. KERJA SAMA ANTAR NEGARA MAUPUN ANTAR PROVINSI DALAM BENTUK MOU AGAR DAPAT DILAKSANAKAN, KHUSUSNYA YANG TERKAIT DENGAN KEPENTINGAN JAWA BARAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERSAMPAHAN, MAUPUN KERJA SAMA BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN DAN WISATA.
7. DENGAN ADANYA SOTK BARU, PERIZINAN SATU PINTU HARUS LEBIH TERINTEGRASI AGAR LEBIH TERINTEGRASI MUDAH DAN LANCAR.
8. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MEREKRUT PEGAWAI DAN PEJABAT ESSELON AGAR MEMBERIKKAN PRIORITAS TERHADAP KOMPETENSI, PROFESIONALITAS, DAN INTEGRITAS PEGAWAI TERSEBUT, SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH.
9. BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SEBAIKNYA DIBERIKKAN SETELAH KEBUTUHAN PERANGKAT DAERAH TINGKAT PROVINSI SECARA PROPORSIONAL TELAH CUKUP UNTUK MENGGERAKKAN RKPD SESUAI YANG DIRENCANAKAN, TERUTAMA UNTUK SEKTOR YANG TERKAIT DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

DALAM BIDANG PEREKONOMIAN, KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN INFRASTRUKTUR.

10. BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA HARUS DI BERIKAN DI SESUAIKAN DENGAN LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, KEMISKINAN, DAN KETERBATASAN KEMAMPUAN PAD. DAN KE DEPAN PERLU DIMASUKKAN JUGA KETAATAN TERHADAP PERAN PEMPROV DALAM SETIAP KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM KOORDINASI KERJA. HAL INI SEBAGAI LANGKAH EVALUASI MENGGINGAT TIDAK SERIUSNYA BUPATI/WALIKOTA APABILA MENDAPAT UNDANGAN GUBERNUR DALAM RAPAT KERJA TINGKAT PROVINSI.
11. UNTUK SEGERA DILAKUKAN PENGUKURAN ULANG ASET LAHAN PT. BIJB SECARA KESELURUHAN SEHINGGA DIPEROLEH DATA HASIL PENGUKURAN YANG KOMPREHENSIF DAN AKURAT.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 120.04/Kep.DPRD-07/2018
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN MASA AKHIR JABATAN (LKPJ-AMJ)
2013-2018.
TANGGAL : 02 Mei 2018.

CATATAN STRATEGIS LKPJ-AMJ 2013-2018

UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PASAL 9 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 MENGAMANATKAN KEPALA DAERAH UNTUK MENYAMPAIKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, BAIK BERBENTUK LPPD MAUPUN LKPJ – AMJ, SELANJUTNYA DPRD BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 – 2018 DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 25 TAHUN 2013 YANG MERUPAKAN LANDASAN DAN ACUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT SERTA KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI JAWA BARAT DIMANA TOLOK UKUR NYA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN **VISI JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA.**

DALAM HAL INI DPRD MELIHAT KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SECARA UMUM SELAMA 5 (LIMA) TAHUN DALAM BENTUK CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN YANG DI TARGETKAN, YAITU :

INDIKATOR	TAHUN	CAPAIAN	TAHUN	CAPAIAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	2013	68,25	2017	70,05
INDEKS KESEHATAN	2013	80,14	2017	80,66
ANGKA HARAPAN HIDUP	2013	72,07	2017	72,44
HARAPAN LAMA SEKOLAH	2013	11,81	2017	12,30
RATA RATA LAMA SEKOLAH	2013	7,58	2017	7,96

INDEKS PENGELUARAN	2013	68,31	2017	70,24
PENGELUARAN PERKAPITA	2013	9,421	2017	10,035

BERDASARKAN DATA DEMOGRAFIS JAWA BARAT SAAT INI DENGAN JUMLAH PENDUDUK YANG MENCAPAI 48.037.827 JIWA PADA TAHUN 2017 MAKA TERLIHAT LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK LPP 1,39 % SEJAK TAHUN 2013 HAL INI SECARA JELAS ADA KENAIKAN JUMLAH PENDUDUK HINGGA 2.696.800 JWA, DEMIKIAN PULA DARI DATA PEREKONOMIAN KITA MELIHAT ADANYA PENURUNAN SEJAK TAHUN 2013 DARI SEMULA 6,33% MENJADI 5,19 % YANG DIPICU OLEH MELAMBATNYA PEREKONOMIAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL, MESKI DEMIKIAN LPE JAWA BARAT MASIH DI ATAS LPE NASIONAL SEBESAR 5,03 %.

ADAPUN DINAMIKA PEREKONOMIAN JAWA BARAT MASIH CUKUP TERKENDALI TERLIHAT DARI PENURUNAN LAJU INFLASI SEJAK 2013 YANG BERKISAR 9,13 % MENURUN DI ANGKA 3,17 % PADA TAHUN 2017, SEHINGGA DENGAN KONDISI PEREKONOMIAN JAWA BARAT SEPERTI INI MASIH MEMBERIKAN DAYA TARIK TERSENDIRI BAGI INVESTOR BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI, TERLIHAT BESARNYA PERTUMBUHAN PMA MAUPUN PMDN DARI RP. 301,40 TRILYUN MENJADI RP. 449,34 TRILYUN DI TAHUN 2017. ARTINYA INVESTASI MENGALAMI PERTUMBUHAN SEBESAR 8,98 %.

MELALUI KAJIAN TERSEBUT DI ATAS DAN HASIL TELAAHAN BAIK MELALUI DENGAR PENDAPAT DENGAN MASYARAKAT, PERANGKAT DAERAH MAUPUN STAKE HOLDER DI BADAN KOORDINASI WILAYAH DI SELURUH JABAR DI 4 WILAYAH KAMI SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT:

MISI PERTAMA : **“MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”**

TUJUAN :

1. DALAM RANGKA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN YANG UNGGUL, TERJANGKAU, DAN MERATA .
2. TERWUJUDNYA MASYARAKAT PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMILIKI DAYA SAING SEHINGGA MEMILIKI KINERJA DALAM IMPLEMENTASI DI MASYARAKAT.
3. TERWUJUDNYA JANJI GUBERNUR TERKAIT PENDIDIKAN GRATIS.

4. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN SERTA PERLUASAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG TERJANGKAU DAN MERATA.
5. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN BERBUDAA IPTEK.
6. PENINGKATAN KUALITAS KETAHANAN KELUARGA .

DARI MISI PERTAMA INI DPRD MELIHAT ADA KESUNGGUHAN UPAYA GUBERNUR BESERTA SELURUH JAJARANNYA UNTUK FOKUS PADA KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI ALOKASI PEMBIYAAAN SEBESAR 20 PERSEN DARI TOTAL APBD PADA KURUN WAKTU 2013 – 2018 YANG TELAH DIREALISASIKAN DIANTARANYA BERUPA PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK/MA RATA RATA SEBANYAK RP. 1.400.000/SISWA/TAHUN DAN BOS SMP/SMPLB SEBESAR RP. 1.000.000/SISWA/TAHUN, SELAIN JUGA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) YANG BERJUMLAH LEBIH DARI 20.000 UNIT, RKB SEBANYAK 868 UNIT UNTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA SERTA BANTUAN BEASISWA SEBANYAK 4640 SISWA UNTUK KE PERGURUAN TINGGI, SELAIN JUGA UNTUK ATLET, GURU DAN MAHASISWA BERPRESTASI SEBANYAK 484 ORANG DENGAN NILAI RP. 97,168 MILIAR.

PENINGKATAN TERJADI PULA DI BIDANG KESEHATAN MENINGKATNYA INDEKS KESEHATAN DARI 80,14 POIN PADA TAHUN 2013 MENJADI 81,18 POIN PADA TAHUN 2017, AHH DARI 72,09 TAHUN MENJADI 72,77 TAHUN 2017, DITINJAU DARI SUDUT APBD BIDANG KESEHATAN TELAH DI LAKSANAKAN ALOKASI SEBESAR 10% DARI TOTAL APBD SEJAK TAHUN 2013 HINGGA TAHUN 2018.

DEMIKIAN JUGA DALAM BIDANG SDM, JUMLAH KARYA IPTEK ADA PENINGKATAN, SEDANGKAN KUALITAS KETAHANAN KELUARGA DI TUNJUKKAN OLEH INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) YANG MENINGKAT DARI 69,57 POIN PADA TAHUN 2013 MENJADI 71,15 PADA TAHUN 2017.

DARI TELAAHAN DI ATAS KEBERHASILAN YANG TELAH DI CAPAI TENTU KAMI BERIKAN APRESIASI. NAMUN DEMIKIAN, MASIH BANYAK MENEMUKAN BERBAGAI KEKURANGAN BAIK DALAM IMPLEMENTASI MAUPUN REALISASI JANJI GUBERNUR, YAKNI BERUPA CATATAN:

1. PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS SEBAGAI HARAPAN GUBERNUR DALAM WUJUDNYA DI JAWA BARAT, SD SAMPAI SLTA HINGGA SAAT INI BELUM MENYENTUH SECARA LANGSUNG DAN MERATA. LAYANAN PENDIDIKAN DI TINGKAT SLTA MASIH BANYAK PERSOALAN, KHUSUSNYA SEJAK

DIAMBIL ALIH OLEH JABAR, TERMASUK PADA SAAT MUSIM PENERIMAAN SISWA BARU.

2. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MASIH BELUM MERATA, DARI JANGKAUAN WILAYAH MAUPUN KEBUTUHAN MENDASAR MASYARAKAT, TERUTAMA DI DAERAH PINGGIRAN ATAU DESA.
3. PROGRAM PERBAIKAN SARANA PENDIDIKAN SERTA PEMBANGUNAN RKB PERLU TERUS DIMONITOR DAN DILAKUKAN PENGAWASAN SECARA KETAT AGAR OPTIMALISASI KUALITAS BANGUNAN DAN PEMERETAAN DAPAT TERCAPAI .
4. BANTUAN BIAYA OPERASIONAL (BOS) SELAIN MASIH BELUM MEMENUHI HARAPAN JUGA BESARANNYA PERLU DITINGKATKAN LAGI AGAR TUJUAN SEKOLAH GRATIS UNTUK SELURUH MASYARAKAT DAPAT TERCAPAI.
5. PROGRAM KEJURUAN SMK PERLU MENJADI PERHATIAN KHUSUS DALAM RANGKA PERSAINGAN DALAM MENETAPKAN DUNIA LAPANGAN KERJA.
6. BANTUAN PUSKESMAS AGAR LEBIH DITINGKATKAN SEHINGGA MAMPU MERAWAT MASYARAKAT AGAR TIDAK PERLU DATANG KE KOTA. UNTUK ITU, SARANA KESEHATAN PUSKESMAS, RSUD MAUPUN TIM DOKTER TERMASUK SPESIALIS AGAR MENJADI PERHATIAN DAN DITINGKATKAN LAGI DI MASA YANG AKAN DATANG.
7. PERLU TERUS DITINGKATKAN JALINAN KERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI UTAMA DAN SWASTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN SISWA DAERAH YANG BERPRESTASI UNTUK MENJADI PRIORITAS DAN MENDAPATKAN BEA SISWA.
8. BAGI PARA PEMULA DUNIA KEWIRAUSAHAAN PERGURUAN TINGGI AGAR DI BERI AKSES DALAM MELANJUTKAN PENGETAHUANNYA BEKERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG BERADA DI JAWA BARAT DALAM RANGKA MENYIAPKAN PENGUSAHA HANDAL DI ERA PERSAINGAN ASIA PASIFIK KE DEPAN.
9. DUKUNGAN SARANA DAN ANGGARAN KESEHATAN SEBAGAI STIMULUS DALAM MENINGKATKAN PARTISISIPASI MASYARAKAT PERLU DITINGKATKAN LAGI, TERMASUK DI DALAMNYA PERBAIKAN SANITASI DI PEDESAAN YANG HARUS LEBIH MENJADI PERHATIAN SERIUS.
10. PERLU DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM MENGGERAKKAN KEWIRAUSAHAAN DI KALANGAN ANAK MUDA SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN SEMANGAT BAGI PERSAINGAN USAHA DI MASA DEPAN, KHUSUSNYA PERKUATAN PADA AKSES MODAL DAN TEKNOLOGI.

MISI KEDUA, **“MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN”**.

TUJUAN :

1. MENJADIKAN JAWA BARAT SEBAGAI DAERAH PERTANIAN BERBASIS AGRIKULTUR.
2. PENINGKATAN DAYA SAING USAHA PERTANIAN MELALUI SERTIFIKASI JAMINAN MUTU PELAKU USAHA PRODUK PERTANIAN.
3. PENINGKATAN DAYA SAING URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN OLAHAN HASI BUDI DAYA PERIKANANAN DAN KELAUTAN.
4. PENINGKATAN OLAHAN HASIL PRODUK KAYU HUTAN DALAM BIDANG KEHUTANAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN.
5. PENINGKATAN KUALITAS IKLIM USAHA DAN IVESTASI DI JAWA BARAT DI LIHAT DARI BESARAN JUMLAH PMA DAN PMDN SERTA MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI.
6. PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PARIWISATA BAIK SARANA PRASARANA WISATA JAWA BARAT TERMASUK BERKEMBANGNYA DESTINASI DAN INFRA STRUKTUR KAWASAN WISATA.
7. PENINGKATAN BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI POTENSIAL DI JAWA BARAT.
8. MENINGKATNYA JUMLAH DAN KWALITAS WIRUSAHAWAN KHUSUSNYA YANG PEMULA, TERMASUK JUGA PERHATIAN KEPADA UKM DAN KOPERASI SEBAGAI KEGIATAN USAHA BANYAK MASYARAKAT DI JAWA BARAT.
9. PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DAN MENINGKATNYA ANGKA INVESTASI REGIONAL SEBAGAI DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DI TINGKAT DAERAH KHUSUSNYA PEDESAAN .

SELANJUTNYA DALAM RANGKA MENILAI DAN MEMBERIKAN MASUKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA KE DEPAN TERKAIT MASALAH MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN DPRD MENYAMPAIKAN CATATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. DENGAN LAJU PERTUMBUHAN YANG CUKUP TINGGI, YAKNI SEBESAR 5,19 % PADA TAHUN 2017 TERNYATA MASIH BELUM MAMPU MEMBERIKAN PERCEPATAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA DI SELURUH DAERAH, HAL INI DAPAT TERJADI KARENA BELUM ADANYA SINERGITAS ANTARA PROVINSI DAN

KABUPATEN KOTA UNTUK BERSAMA MENCIPTAKAN DAERAH POTENSI YANG MAMPU MENINGKATKAN PELUANG INVESTASI.

2. MENINGKATNYA ANGKA INVESTASI DARI RP. 301,40 TRILYUN PADA TAHUN 2013 MENJADI RP. 449,34 TRILYUN DI TAHUN 2017 (PMA MAUPUN PMDN) TERNYATA SECARA SIGNIFIKAN TIDAK MEMBERIKAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA SESUAI JANJI GUBERNUR. HAL INI TERJADI KARENA PERTUMBUHAN HANYA MUNCUL DI KAWASAN INDUSTRI TERTENTU YANG PADAT TEKNOLOGI DAN PADAT MODAL SEHINGGA PENYERAPAN TENAGA KERJA SANGAT TERBATAS, SELAIN DIPICU MASIH BESARNYA URBANISASI YANG MASUK KE JAWA BARAT.
3. PERANAN SWASTA SKALA MENENGAH UNTUK PROYEK YANG MENGANDALKAN APBN ATAU APBD, KHUSUSNYA BIDANG KONSTRUKSI, JASA DAN PERDAGAANGAN SAAT INI MENGALAMI PENURUNAN DRASTIS AKIBAT SEMAKIN MENGUATNYA PERAN BUMN DALAM MENGAMBIL PORSI PENGUSAHA DAERAH. AKIBATNYA, SEMAKIN MELUASNYA PENGANGGURAN, BAIK DUNIA USAHA, MAUPUN PARA PENGUSAHA KECIL-MENENGAH.
4. KEMISKINAN MASIH MENJADI PR. ANGKA KEMISKINAN YANG MENCAPAI 3,770 JUTA JIWA ATAU 7,83 % DARI TOTAL MASYARAKAT JAWA BARAT MEMBUTUHKAN PEMERATAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH SAAT INI.
5. KESENJANGAN DITUNJUKKAN DENGAN INDEKS GINI 0,39. KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH BAGIAN UTARA SELATAN DAN BAGIAN TENGAH MERUPAKAN SALAH SATU HAL YANG HARUS TETAP MENJADI FOKUS PERBAIKAN GUBERNUR YANG AKAN DATANG.
6. MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, BAIK JALAN TOLL, BANDARA, BENDUNGAN, SUDAH PASTI MENGAKIBATKAN TERJADINYA ALIH FUNGSI LAHAN, TERMASUK DI DALAMNYA ALIH LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF. HAL INI MEMANG TIDAK TERHINDARKAN. PENCETAKAN SAWAH BARU DAN PEMBANGUNAN SARANA IRIGASI JUGA MASIH MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH.
7. PERANAN BUMD STRATEGIS YANG MEMILIKI POTENSI BERKEMBANG SAAT INI SANGAT MEMPRIHATINKAN KARENA TIDAK EFFISIEN DAN OPTIMAL. HAL INI TERLIHAT DARI BANYAKNYA BUMD DAN ANAK PERUSAHAAN YANG DARI ASPEK BISNIS MASIH TIDAK MEMILIKI POTENSI KE DEPAN DI LIHAT DARI BISNIS PLAN, SUMBER DAYA MANUSIA, MAUPUN PROBLEMATIK KEUANGANGAN YANG MEMBELITNYA. UNTUK

ITU, DIIDENTIFIKASI MANA BUMD BAIK YANG MASIH MEMILIKI POTENSI DAN YANG TIDAK YANG SEBAKNYA DILIKUIDASI ATAU DIMERGER.

8. BUMD BAIK UNTUK INDUSTRI STRATEGIS YANG TERKAIT INFRA STRUKTUR BAIK TOLL, BANDAR, PERSAMPAHAN, DAN ENERGI HARUS DI TUNJANG AGAR MAMPU LEBIH BERKEMBANG LAGI SESUAI TUGAS DAN HARAPAN PEMERINTAHAN DAERAH KE DEPAN. DUKUNGAN MODAL, AKSES, MAUPUN PENINGKATAN SDM HARUS DIKUTI DENGAN PENGAWASAN KETAT AGAR LEBIH TERTATA DAN SESUAI DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA BAGI BUMD TERSEBUT .
9. APRESIASI BANK JABAR BANTEN SEBAGAI BANK BESAR YANG MASUK DALAM 15 BANK TERBAIK HARUS TETAP DIJAGA SESUAI KARAKTER BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG LEBIH FOKUS UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT JAWA BARAT. KINERJA BJB PERLU DIKUTI DENGAN EFISIENSI OPERASIONAL, EFEKTIF DALAM PENYALURAN KREDIT YANG MEMILIKI NILAI EKONOMI, SERTA MEMBERIKAN DAYA DUKUNG KEPADA PENGUSAHA DAERAH SKALA KECIL MENENGAH BESAR YANG MEMILIKI KEMAMPUAN Mendukung PEREKONOMIAN JABAR. EKSPANSI BESAR YANG DAPAT MENIMBULKAN RISIKO BESAR DAN MENGGANGGU LIKUIDITAS MODAL AGAR DIEVALUASI KEMBALI DAN DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN SDM KARYAWAN BJB ITU SENDIRI TERMASUK PENAMBAHAN KANTOR CABANG DI LUAR PROVINSI JAWA BARAT.
10. BJB SYARIAH SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN YANG SAAT INI BERMASALAH HARUS DITANGANI SECARA HATI-HATI AGAR TIDAK MENIMBULKAN PERMASALAHAN MISMANAJEMEN DAN KETIDAKMAMPUAN DIREKSI BJB SYARIAH. PENGAWASAN OJK TERKAIT INI DAN ADANYA PERSOALAN HUKUM HARUS MENJADI PEMBELAJARAN PAHIT AGAR TIDAK TERULANG KEMBALI DI MASA DEPAN. MAKA, DIREKSI BANK HARUS DIKUTI DENGAN KEMAMPUAN YANG MUMPUNI SESUAI STANDARD OJK DAN DILAKUKAN SECARA PROFESIONAL. SUNTIKAN MODAL YANG MUNCUL AKIBAT PERSOALAN INI HARUS DILAPORKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI PEMILIK MEWAKILI DAERAH DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI.
11. KEBIJAKAN YANG ADA BELUM KOMPREHENSIF TERKAIT DESTINASI WISATA JAWA BARAT. AKIBATNYA, PEMERINTAH PUSAT TIDAK MEMASUKKAN DALAM TUJUAN DESTINASI WISATA NASIONAL, TERMASUK DI DALAMNYA MASIH LEMAHNYA PROMOSI WISATA AKIBAT

KETERBATASAN PEMBIAYAAN. HAL INI AKIBAT KURANGN MAKSIMALNYA PEMERINTAH DAERAH MENGGARAP BIDANG WISATA.

12. PERAN BIDANG SENI BUDAYA BELUM DISENTUH SECARA SUNGGUH-SUNGGUH, SEHINGGA BELUM MAMPU MENUNJANG DUNIA WISATA JAWA BARAT YANG SESUNGGUHNYA DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH.
13. INVESTASI SWASTA HARUS SUDAH MULAI DIARAHKAN UNTUK MENUNJANG PROGRAM AGROINDUSTRI, BAIK PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN DENGAN MEMBANGUN KAWASAN AGRO TERINTEGRASI SEHINGGA MAMPU MENAWARKAN KAWASAN BARU DI LUAR KAWASAN INDUSTRI MANUFAKTUR .
14. DUKUNGAN KOPERASI, UKM DAN PARA PEMULA WIRAUSAHA BARU HARUS TERUS DI DORONG LAGI BAIK DALAM BENTUK KETERSDEDIAAN MODAL, TEKNOLOGI MAUPUN PENGETAHUAN YANG DITUNJANG OLEH PERDA KEWIRUSAHAAN, HAL INI PENTING SEBAGAI POTENSI BESAR DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA.
15. PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DI LUAR PAJAK DAERAH PERLU TERUS DITINGKATKAN MELALUI BUMD, POTENSI DAERAH, DIVERSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN YANG BOLEH DI LAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

MISI KETIGA **“MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK “**

TUJUAN :

1. PENINGKATAN KUALITAS DAN AKUNTABILITAS LAYANAN PEMERINTAHAN.
2. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN BER BASIS IPTEK.
3. PROFESIONALISME DAN KUALITAS KEHIDUPAN APARATUR YANG SEMAKIN BAIK.
4. PENINGKATAN STABILITAS TRATIBUM, KESADRAN POLITIK DAN HUKUM.

MENINGKATNYA PERAN APARATUR SIPIL NEGARA ASN SEJALAN DENGAN SEMAKIN BESARNYA TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYAN PUBLIK OLEH APARAT, PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SELAIN MENDAPATKAN WTP SELAMA 6 TAHUN BERTURUT TURUT JUGA TELAH MENDAPAT PENILAIAN POSITIF A DALAM AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR

PEMERINTAH DARI PUSAT HAL INI PATUT KITA APRESIASI, MESKI DEMIKIAN DPRD MEMBERIKAN CATATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS DI TINGKAT PROVINSI DENGAN PENILAIAN A, SAYANG BELUM DIKUTI OLEH KABUPATEN DAN KOTA YANG PADA SAAT INI MASIH MENDAPAT NILAI B DAN C. HAL INI PERLU JADI PERHATIAN DALAM KOORDINASI, PEMBINAAN, SERTA ALIH PENGETAHUAN KE KABUPATEN/ KOTA.
2. PENINGKATAN KUALITAS APARATUR DALAM BIDANG PENDAPATAN DAERAH DARI SEMULA RP. 12,3 TRILYUN PADA TAHUN 2013 MENJADI RP. 18,3 TRILYUN PADA TAHUN 2017 PATUT DI APRESIASI. BESARAN INI MASIH DAPAT DIOPTIMALKAN KARENA MASIH BESARNYA POTENSI PAJAK YANG DAPAT DITINGKATKAN LAGI, TERUTAMA KENDARAAN BERMOTOR MAUPUN BUMD.
3. KETERBUKAAN INFORMASI PERLU DITINGKATKAN LAGI KARENA MASIH BANYAK MASYARAKAT YANG BELUM TAHU DAN TIDAK MEMAHAMI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT.
4. POTENSI IPTEK DI JABAR SANGAT BESAR. UNTUK ITU, SEBAIKNYA APARATUR TEKNIS BIDANG INI MAMPU BEKERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI DI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN HASIL PENELITIAN.
5. PENINGKATAN TRANTIBUM DI KAWASAN JAWA BARAT TETAP HARUS DIJAGA KARENA PROPINSI TERDEKAT IBU KOTA INI AKAN MAMPU MENIMBULKAN IMPLIKASI BESAR APABILA TIMBUL GONCANGAN DI KAWASAN INI. AKTIVITAS INTOLERANSI, TERORIS YANG NYATA TINGGI YANG BERASAL DARI KAWASAN INI PERLU DIATASI OLEH APARAT SEHINGGA KEBERSAMAAN DI DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DAERAH MENJADI SANGAT PENTING.
6. PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI UJUNG TERDEKAT DENGAN MASYARAKAT MESKI MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA PERLU MENDAPAT PERHATIAN PEMERINTAH PROVINSI, KHUSUSNYA DALAM PEMBINAAN APARATUR DESA, BANTUAN KEUANGAN SDM, DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA. BERBAGAI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEPERTI POSYANDU, RUTILAHU, DAN DANA PEMBANGUNAN MESJID MASIH TETAP PERLU DITINGKATKAN KARENA SANGAT MENYENTUH KEBUTUHAN HIDUP MASYARAKAT DI PEDESAAN.

MISI KEEMPAT : “MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BER KELANJUTAN”

TUJUAN :

1. MENINGKATNYA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG KAWASAN LINDUNG SERTA KUALITAS PENANGANAN BENCANA.
2. MENINGKATNYA PEMENUHAN KWALITAS INFRASTRUKTUR DASAR MASYARAKAT DALAM BIDANG EMISI GAS, JALAN RAYA PROVINSI, JARINGAN IRIGASI, ELEKTRIFIKASI RUMAH, PELAYANAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN, PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN ENERGI.
3. MENINGKATNYA PERCEPATAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS SEPERTI JALAN PENGHUBUNG KAB KOTA, BANDARA, PELABUHAN SERTA SUNGAI DAN WADUK BESAR.

KESUNGGUHAN PEMERINTAH DAERAH TERUTAMA GUBERNUR DALAM MENANGANI URUSAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP TENTU MENJADI SALAH SATU KINERJA TERBAIK YANG DI NIKMATI MASYARAKAT JAWA BARAT, SEPERTI PEMBANGUNAN BANDARA KERTAJATI, NUSAWIRU, LISTRIK MASUK DESA, TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA DAN NAMBO, PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI, SERTA MENINGKATKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG. NAMUN DEMIKIAN, DPRD MENDAPAT MASUKAN DAN LAPORAN TERKAIT BEBERAPA CATATAN, BERIKUT:

1. PERLU LEBIH DITINGKATKAN LAGI FUNGSI KAWASAN LINDUNG YANG MAMPU MENJAGA KEAMANAN DAERAH TERHADAP TERJANGAN BENCANA, SEPERTI BANJIR DAN LONGSOR YANG SAAT INI BANYAK TERJADI DI JAWA BARAT. CAPAIAN FUNGSI LAHAN KAWASAN LINDUNG MENINGKAT, TETAPI KETIDAKTAATAN KABUPATEN KOTA DALAM MENJAGA RUTR-NYA MENYEBABKAN BANYAKNYA PERIZINAN ILEGAL. MISALNYA DI KAWASAN BANDUNG UTARA DAN DAERAH HULU SUNGAI CITARUM.
2. MESKI ADA PENURUNAN EMISI GAS, KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT PENGGUNAAN BAHAN BAKAR PERUSAK LINGKUNGAN MASIH CUKUP TINGGI. UNTUK ITU, PERAN DAN BIMBINGAN KEPADA MASYARAKAT PERLU DITINGKATKAN LAGI.
3. JARINGAN IRIGASI YANG DIBANGUN DINAS TERKAIT MASIH SANGAT KECIL DIBANDING KEBUTUHAN LUAS PERTANIAN YANG PERLU DIAIRI.

4. RASIO ELEKTRIFIKASI YANG TINGGI PERLU DICERMATI MENINGGAT MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT DI DAERAH YANG BELUM MENDAPAT SAMBUNGAN LISTRIK .
5. BUANGAN LIMBAH PABRIK DI KAWASAN CITARUM SEMAKIN MENJADI. TINDAKAN TEGAS DAN MENGAJUKAN KE PENGADILAN DALAM RANGKA LAW ENFORCEMENT MERUPAKAN KEHARUSAN UNTUK EFEK JERA.
6. PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI MASIH PERLU DIPACU DENGAN JALAN BARU, UNDER PASS DAN FLY OVER UNTUK MENGIMBANGI KEMACETAN DI DALAM KOTA ATAU DI JALAN PENGHUBUNG ANTAR KOTA SERTA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERKONEKSI JALAN KABUPATEN DAN KOTA.
7. PEMBANGUNAN TPPAS REGIONAL HARUS DIPERCEPAT MENINGGAT KEBUTUHAN YANG SUDAH SANGAT MENDESAK.
8. PEMBANGUNAN AKSES JALAN KE KAWASAM PARIWISATA, SARANA PJU DAN MARKA JALAN, SERTA PENATAAN AREA KAWASAN HARUS MENJADI PERHATIAN, TERMASUK PEMBANGUNAN BANDARA SEBAGAI SARANA TRANSPORTSI UDARA.
9. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH RAKYAT MISKIN SEBANYAK 100.000 BILA DIGABUNGGAN DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PUSATPUN MASIH KURANG.

MISI KELIMA **“MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL, SENI DAN BUADAYA, PERAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL “**

TUJUAN :

1. MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN SERTA MENINGKATNYA JUMLAH PMKS.
2. MENINGKATNYA PERAN PEMUDA, KOMUNITAS SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BERBAGAI LINGKUP BIDANG SOSIAL TERMASUK MENINGKATKAN PRSETASI OLAH RAGA.
3. MENDORONG PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN OLAH RAGA, SENI BUDAYA DAN PARIWISATA.
4. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA UNTUK MENDORONG PERAN SOSIAL PEMUDA, MASYARKAT BAIK DALAM OLAH RAGA, SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG DIKUTI DENGAN BERBAGAI INDEX KEMISKINANA DARI 9,61 % MENJADI 7,83 % PADA TAHUN 2017 SERTA MENINGKATNYA PMKS DARI 479.255 ORANG PADA TAHUN 2013 MENJADI 479.255 SERTA MENURUNNYA JUMLAH PEKERJA ANAK TENTU MENUNJUKKAN UPAYA POSITIF PEMERINTAH

DAERAH DAN GUBERNUR. NAMUN DARI KONDISI NYATA DI MASYARAKAT PROBLEMATIK INI PERLU KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI CATATAN YAKNI ;

- 1) KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DI MASYARAKAT YANG SECARA NYATA SEKITAR 8,225 DI TAHUN 2017 SESUNGGUHNYA INI MENYIMPAN KETIMPANGAN KARENA ANGKA ABSOLUTNYA BISA MENCAPAI 2 JUTA JIWA YANG MERATA DI BERBAGAI DAERAH.
- 2) PERAN KONI SEBAGAI WADAH ORGANISASI OLAH RAGA PERLU DITINGKATKAN DALAM MENGELOLA PRESTASI ATLET JABAR YANG PADA SAAT PON SUKSES MENJUARAI PON NASIONAL DAN SUKSES DALAM PENYELENGGARAANNYA. KIRANYA SARANA OLAH RAGA YANG TERSEBAR DI BERBAGAI DAERAH TERSEBUT DAPAT SECARA LEBIH OPTIMAL.
- 3) DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP ORMAS DI BERBAGAI BIDANG SOSIAL, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA HARUS DITINGKATKAN LAGI BAIK DALAM PEMBINAAN MAUPUN ANGGARAN.
- 4) PERAN ORGANISASI PEMUDA, PROFESI, DAN KEMAHASISWAAN MERUPAKAN ASSET NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH YANG PERLU TERUS DIJAGA, DIBINA, DAN DIPUPUK AGAR MAMPU BERKIPRAH POSITIF DALAM PEMBANGUNANAN JAWA BARAT SELANJUTNYA.

BERDASARKAN PENELAAHAN YANG MENDALAM SERTA DIKUTI DENGAN PENILAIAN BERDASARKAN PARAMETER DAN KONDISIN RIIL, PEMERINTAH JAWA BARAT TELAH MENCAPAI **PENGHARGAAN 161 ANUGRAH NASIONAL, 6 KALI WTP SERTA MENDAPAT PARASAMYA PURNA KARYA NUGRAHA SEBAGAI PROVINSI TERBAIK DALAM PEMBANGUNAN DARI PRESIDEN RI, TELAH MENUNJUKKAN PRESTASI BAIK** DI TUNJANG OLEH SELURUH JAJARAN PERANGKAT DAERAH, SEGENAP MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN TERUTAMA ADANYA DUKUNGAN DAN KERJASAMA YANG BAIK DENGAN DPRD JAWA BARAT.

VISI “ JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA BAGI SEMUA “

MENURUT PENILAIAN DAN PENGAMATAN DPRD MASIH PERLU DIPERJUANGKAN DAN BELUM BERHASIL SESUAI HARAPAN MASYARAKAT

JAWA BARAT, HAL INI PERLU DILANJUTKAN GUBERNUR TERPILIH YANG AKAN DATANG HASIL PILKADA TAHUN 2018.

PEMBAHASAN LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2017 DI LAKUKAN SECARA BERSAMAAN DENGAN PEMBAHASAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR YANG AKAN BERAKHIR PADA BULAN JUNI TAHUN 2018, SEHINGGA TAHUN 2017 MERUPAKAN TAHUN STRATEGIS KEEMPAT MASA KEPEMIMPINAN GUBERNUR SAAT INI YANG MERUPAKAN TAHUN STRATEGIS DALAM RANGKA MEMENUHI TARGET PEMBANGUNAN SESUAI RPJMD 2013 – 2018 DAN RKPD TAHUN 2017, KAMI MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH TERHADAP KINERJA DAN KERJA SAMA YANG BAIK SAUDARA GUBERNUR DENGAN DPRD DAN MASYARAKAT TERMASUK PARA PEMANGKU KEPERNTINGAN YANG BERPARTISIPASI.

BANYAKNYA PENGHARGAAN YANG DI TERIMA SELAMA INI MERUPAKAN WUJUD NYATA KESUNGGUHAN GUBERNUR BESERTA SELURUH JAJARANNYA UNTUK BEKERJA DAN MEMENUHI TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN SESUAI PERENCANAAN YANG TELAH DITETAPKAN BERSAMA DPRD JAWA BARAT. DUKUNGAN YANG NYATA PEMERINTAH PUSAT KABUPATEN DAN KOTA DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN MEMPERLIHATKAN ADANYA SINERGITAS PEMBANGUNAN YANG LEBIH KONKRET DALAM RANGKA MEWUJUKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

BERITA ACARA

PENYERAHAN REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT
AKHIR MASA JABATAN (LKPJ-AMJ) 2013-2018
DARI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA
GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 121.04/1444-SETWAN.PRSD&PUU/2018

Pada hari Rabu, tanggal Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-05-2018), bertempat di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : INEU PURWADEWI SUNDARI
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 27 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : AHMAD HERYAWAN
Jabatan : Gubernur Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK DUA.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2017 Dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2013-2018.

Rekomendasi dimaksud berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke depan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 02 Mei 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Ketua,

ttd

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

AHMAD HERYAWAN